

SAMBUTAN | KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Petunjuk Teknis Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024 yang disusun bersama, melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga pengampu program Percepatan Penurunan Stunting dapat diselesaikan. Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan agar pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dapat berjalan efektif diantaranya dengan memperhatikan ketersediaan dan standarisasi antropometri di setiap posyandu, keterampilan kader dalam melaksanakan penimbangan dan pengukuran, serta cakupan sasaran datang ke posyandu diatas sembilan puluh lima persen.

Didasari atas arahan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat dalam Rapat Tingkat Menteri pada tanggal 19 Maret 2024, maka Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting menjadi gerakan bersama berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi yang tepat sasaran dan efektif kepada sasaran yang memiliki risiko stunting.

Melalui pensasaran prioritas kepada calon pengantin, ibu hamil dan anak usia dibawah lima tahun diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2024
Kepala BKKBN
Selaku Ketua Pelaksana
Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat

ttd

Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

SAMBUTAN | DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN – SETWAPRES

Wakil Presiden pada Rapat Tim Pengarah dan Pelaksana TPPS Pusat tanggal 19 Maret 2024 memberikan arahan untuk dilakukan analisis mengapa terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting pada dua tahun terakhir. Selanjutnya pada Rapat Rakernas Bangsa Kencana dan PPS 2024 tanggal 25 April 2024, Wakil Presiden memberikan arahan, pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi, agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya; kedua, fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting; ketiga, arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting; dan keempat, agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di Pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas dan waktu yang tersedia untuk implementasi program, maka target untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 memerlukan komitmen tinggi dan kerja keras dari semua pihak untuk bergerak sama melakukan terobosan (inovasi) untuk mempercepat pencapaian target penurunan stunting.

Pengukuran dan Intervensi serentak pencegahan stunting yang akan dimulai bulan Juni 2024 menandakan keseriusan Pemerintah untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan stunting dan sekaligus menangani stunting.

Pengukuran dan Intervensi serentak adalah kebijakan inovatif, sebagai gerakan bersama yang melibatkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa,

untuk mencegah bertambahnya anak stunting baru melalui kegiatan pengukuran dan penimbangan serentak di semua posyandu aktif di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan pengukuran dan intervensi serentak ini diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen penanganan stunting secara nasional, yang didukung tersedianya data stunting yang akurat dan kredibel sehingga intervensi program penanganan stunting semakin terarah dan tepat sasaran.

Kami berharap semua pihak dapat memanfaatkan momentum ini melaksanakan 10 PASTI pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dengan komitmen tinggi. Masa pelaksanaan intervensi serentak yang pendek, membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari semua pihak untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan.

Kami juga menyambut baik inisiatif penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengukuran dan Intervensi Serentak ini, untuk mendukung semua pihak dalam pelaksanaan di lapangan. Semoga Juknis ini dapat tersosialisasi dan dipahami dengan baik untuk pelaksanaan yang lebih efektif dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting baru.

Jakarta, Mei 2024
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan
Pembangunan

ttd

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

SAMBUTAN | DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya kita semua masih dilimpahkan kekuatan untuk terus berikhtiar menguatkan kolaborasi bersama dalam rangka perbaikan status gizi bangsa Indonesia, melalui pencegahan stunting yang menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Inisiasi pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting merupakan refleksi dari upaya kita selama ini, di mana melalui konvergensi, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama, memperbaiki kondisi tumbuh kembang anak sehingga dapat mencegah terjadinya kasus stunting baru.

Untuk memperkuat upaya pencegahan stunting ke depan, strategi kunci yang perlu dilakukan mencakup a) pemenuhan cakupan dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif kunci pada kelompok sasaran, b) peningkatan konvergensi, di mana seluruh intervensi yang dibutuhkan menasar pada kelompok sasaran (utamanya kelompok 1.000 hari pertama kehidupan), c) pendampingan keluarga, serta d) perbaikan pada pemantauan dan evaluasi, yang didukung dengan kualitas data dan pemanfaatannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengukuran dan intervensi serentak diharapkan dapat menjadi a) pembelajaran bagi kita semua, b) awal peningkatan dari seluruh upaya intervensi yang telah dilakukan termasuk kualitas konvergensi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, c) penguatan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh upaya yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi input bagi perbaikan ke depan, serta d) perbaikan kebijakan, perencanaan kegiatan, dan kerja sama lintas sektor, yang diarahkan pada keberlanjutan intervensi praktik baik yang sudah diterapkan serta peningkatan kualitas dari upaya pencegahan stunting yang perlu terus dilakukan.

Jakarta, Mei 2024
Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan

ttd

Amich Alhumami

SAMBUTAN | PLT. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN – KEMENKO PMK

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallah Wataala karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka peluncuran Buku Petunjuk Teknis Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024. Buku ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama untuk menanggulangi masalah stunting di Indonesia.

Peluncuran Buku Petunjuk Teknis ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan langkah awal dari implementasi yang lebih luas dan mendalam. Dalam konteks ini, dukungan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sangatlah penting. Buku Petunjuk Teknis ini memberikan panduan yang jelas, namun untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kita memerlukan kerjasama yang erat dan terstruktur antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Dalam pelaksanaan Buku Petunjuk Teknis tentang Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, kami mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen dan berkolaborasi.

Mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, dan berinovasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Generasi mendatang berhak untuk tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, serta memiliki masa depan yang lebih cerah.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan peluncuran buku juknis ini. Semoga dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang baik, kita dapat mewujudkan Indonesia bebas stunting.

Jakarta, Mei 2024

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

ttt

Budiono Subambang

SAMBUTAN | DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT – KEMENKES

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini dapat tersusun. Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak di posyandu dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Sasaran pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak ditujukan kepada ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting bertujuan meningkatkan cakupan kunjungan sasaran untuk datang ke posyandu dan mendeteksi dini masalah gizi melalui pengukuran antropometri, dilanjutkan pemberian edukasi pencegahan stunting dan melakukan tindakan intervensi segera pada sasaran bermasalah gizi yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan di puskesmas.

Gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting diharapkan dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kualitas pelaksanaan gerakan pengukuran dan intervensi serentak akan menghasilkan data yang akurat apabila seluruh sasaran ditimbang dan diukur, pengukuran menggunakan alat antropometri sesuai standar yang telah dikalibrasi, kader memenuhi syarat keterampilan untuk melakukan penimbangan dan pengukuran, serta pelaksanaan intervensi PMT pemulihan yang tepat sasaran disertai monitoring dan evaluasi.

Kami harapkan petunjuk teknis ini dapat diimplementasikan pada pelaksanaan gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh daerah di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat

ttd

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

SAMBUTAN | DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH – KEMENDAGRI

Stunting mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar khususnya Bidang Kesehatan, sehingga fungsi pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting* secara luas belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah validasi data nasional yang harus diupdate dan diharmonisasikan oleh setiap stakeholder sebagai pengampu target/KPI (*Key Performance Indicator*) agar supaya target dimaksud dapat diterima secara lengkap oleh kelompok sasaran prioritas, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Berdasarkan hal tersebut baik Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 maupun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 memberikan komitmen terhadap upaya penurunan stunting dengan target prevalensi stunting sebesar 14 Persen di Tahun 2024. Sebagai upaya akselerasi pencapaian target penurunan stunting dan bentuk komitmen yang kuat untuk memastikan pendampingan, pendataan, monitoring dan evaluasi, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.

Untuk mendukung tercapainya target prevalensi *stunting* melalui Gerakan Intervensi Serentak, kami menyambut baik ditetapkannya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini, serta mengajak pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga desa, termasuk mitra pembangunan, yaitu para akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan semua stakeholder terkait untuk menjadikan Buku Petunjuk Teknis ini sebagai referensi dan bersama-sama ikut berperan serta didalamnya. Apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. Semoga hal ini dapat menjadi kontribusi kita untuk pembangunan manusia Indonesia yang semakin baik dimasa mendatang.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal
Bina Pembangunan Daerah

ttd

Ir. Restuardy Daud, M.Sc

SAMBUTAN | DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN – KEMENDESA & PDT

Salah satu upaya pencegahan stunting adalah meningkatkan cakupan layanan yang diterima sasaran. Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi pusat layanan dasar terutama dalam pemantauan tumbuh kembang bayi, balita dan pemeriksaan ibu hamil, mempunyai posisi sangat strategis terutama di perdesaan yang dapat difasilitasi oleh Desa melalui SDM Desa maupun anggaran Desa. Dalam rangka mendorong Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah menyelenggarakan Pengukuran dan intervensi serentak bagi sasaran stunting terutama bayi, balita, ibu hamil dan calon pengantin di Posyandu. Kegiatan ini perlu didukung pelaksanaannya oleh semua pihak sesuai perannya termasuk Pemerintah Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyambut baik penyelenggaraan Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 secara eksplisit disampaikan fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program prioritas Nasional termasuk program Pencegahan dan Penurunan Stunting skala Desa.

Peran Desa melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM) melakukan pendataan sasaran dan layanan serta melakukan pemantauan layanan yang diterima sasaran menghasilkan data Konvergensi (cakupan layanan) Desa yang dapat dijadikan alat kontrol bagi penyedia layanan di Desa untuk meningkatkan kualitas layanannya, baik oleh Desa sendiri maupun oleh sektor. Selain itu, dukungan pendamping profesional Desa terutama yang berada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa siap mendampingi Desa dalam penyelenggaraan kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak ini.

Besar harapan saya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak ini dapat digunakan sebagai pegangan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas dan Pemerintah Desa pada pelaksanaan gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh wilayah Indonesia. Mari cegah stunting untuk investasi generasi yang akan datang dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan

ttd

Sugito, S.Sos., M.H.

DAFTAR ISI

- Sambutan..... 2
- Daftar Isi..... 9
- Latar Belakang.....10
- Definisi Operasional..... 11
- Tujuan dan Sasaran Kegiatan..... 13
- Alur Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting..... 14
- Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.....18
- Langkah-langkah Penyelenggaraan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting..... 21
 - A. Persiapan..... 24
 - B. Pelaksanaan..... 34
 - C. Evaluasi..... 48
- Lampiran..... 50



LATAR BELAKANG

Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi utama balita Indonesia saat ini. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama dan penyakit infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada dibawah standar. Selain itu, kejadian stunting pada balita juga erat kaitannya dengan status kesehatan ibu pada saat hamil dan masa sesudah hamil.

Meski mengalami tren penurunan, prevalensi stunting pada balita di Indonesia penurunannya masih jauh dari harapan. Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24.4% turun menjadi 21,6% (SSGI, 2022) dan 21,5% (Survei Kesehatan Indonesia 2023). Untuk itu diperlukan berbagai strategi dan upaya agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat dicapai.

Deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil, balita dan calon pengantin diharapkan dapat menjadi langkah penapisan pertama di tingkat masyarakat yang dilaksanakan melalui Posyandu. Saat ini sebagian besar Posyandu telah dilengkapi dengan alat antropometri terstandar dan ditunjang dengan kader yang kompeten.

Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas hingga Desa untuk dapat menysisir seluruh sasaran dan melakukan intervensi yang sesuai standar agar hasil yang didapatkan akurat dan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran meningkat. Gerakan ini dilakukan dalam berbagai rangkaian aksi bersama pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi dan intervensi bagi ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan.

Melalui gerakan ini diharapkan 100% sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan berupa deteksi dini dan edukasi, serta intervensi bagi ibu hamil, balita dan catin bermasalah gizi dalam rangka mencegah munculnya kasus stunting baru sehingga Indonesia bebas stunting dapat segera terwujud.

DEFINISI OPERASIONAL

1. **Balita** adalah seseorang yang berusia 0 – 59 bulan.
2. **Balita Berat Badan Tidak Naik (T)** adalah Balita yang berat badannya tidak naik saat penimbangan dibandingkan hasil penimbangan bulan sebelumnya, terbaca dari grafik KMS yang menunjukkan kecenderungan naik tidak cukup, mendatar, dan memotong garis di bawahnya. Berat Badan (BB) Tidak Naik terdiri dari (a) kenaikan BB tidak adekuat; (b) BB tetap; dan (c) BB turun.
3. **Balita Berat Badan Kurang** adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indikator Berat Badan menurut Umur (BB/U) kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD).
4. **Balita Gizi Kurang** adalah Balita dengan status gizi yang berdasarkan indikator Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) berada pada -3 SD sampai dengan < -2 SD. Gizi kurang juga dapat terdeteksi dari Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 12,5 cm sampai dengan 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan.
5. **Balita Gizi buruk** adalah keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut: a) pitting edema bilateral, minimal pada kedua punggung kaki; b) BB/PB atau BB/TB kurang dari -3 SD; d) Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan.
6. **Stunting** adalah keadaan panjang atau tinggi badan seorang anak pada usia tertentu berada dibawah -2 standar deviasi (< -2 SD) dari standar pertumbuhan WHO, yang merefleksikan proses kegagalan mencapai potensi pertumbuhan linear akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang suboptimal (*WHO Conceptual Framework, 2013*)
7. **Catin** adalah calon pengantin atau Pasangan Usia Subur laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan.
8. **Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)** adalah ibu hamil yang mempunyai indeks massa tubuh (IMT) Pra Hamil atau pada Trimester I (<12 minggu) sebesar <18,5 kg/m²
9. **Ibu Hamil Risiko KEK** adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.

DEFINISI OPERASIONAL

- 9. Kader Pembangunan Manusia (KPM)** adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting.
- 10. Tim Pendamping Keluarga (TPK)** adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
- 11. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)** adalah lembaga yang dibentuk lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintahan Desa.
- 12. Pengukuran** adalah penimbangan BB, pengukuran PB atau TB dan LiLA.

TUJUAN & SASARAN KEGIATAN

Tujuan Umum:

Terlaksananya Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu

Tujuan Khusus:

1. 100% ibu hamil, balita dan catin datang ke posyandu
2. 100% ibu hamil diukur lingkaran lengan atas (LiLA)
3. 100% balita ditimbang berat badan (BB) dan diukur panjang badan (PB) atau tinggi badan (TB) menggunakan alat antropometri terstandar yang terkalibrasi
4. 100% ibu hamil dan balita terdeteksi masalah gizi
5. 100% ibu hamil dan balita bermasalah gizi di rujuk ke puskesmas
6. 100% ibu hamil dan balita bermasalah gizi di verifikasi status gizinya di Puskesmas dan mendapatkan intervensi segera sesuai dengan tata laksana
7. 100% ibu hamil, balita dan catin mendapat edukasi pencegahan stunting di posyandu maupun di puskesmas
8. 100% catin mendapatkan bimbingan perkawinan di KUA dan Lembaga Agama lainnya
9. 100% catin mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran BB, TB dan LiLA di Posyandu oleh Tim pendamping Keluarga (TPK)
10. 100% ibu hamil, balita dan catin mendapatkan pendampingan oleh TPK
11. Catin terdata di Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil)

Sasaran



Ibu Hamil



Balita



Calon Pengantin

ALUR

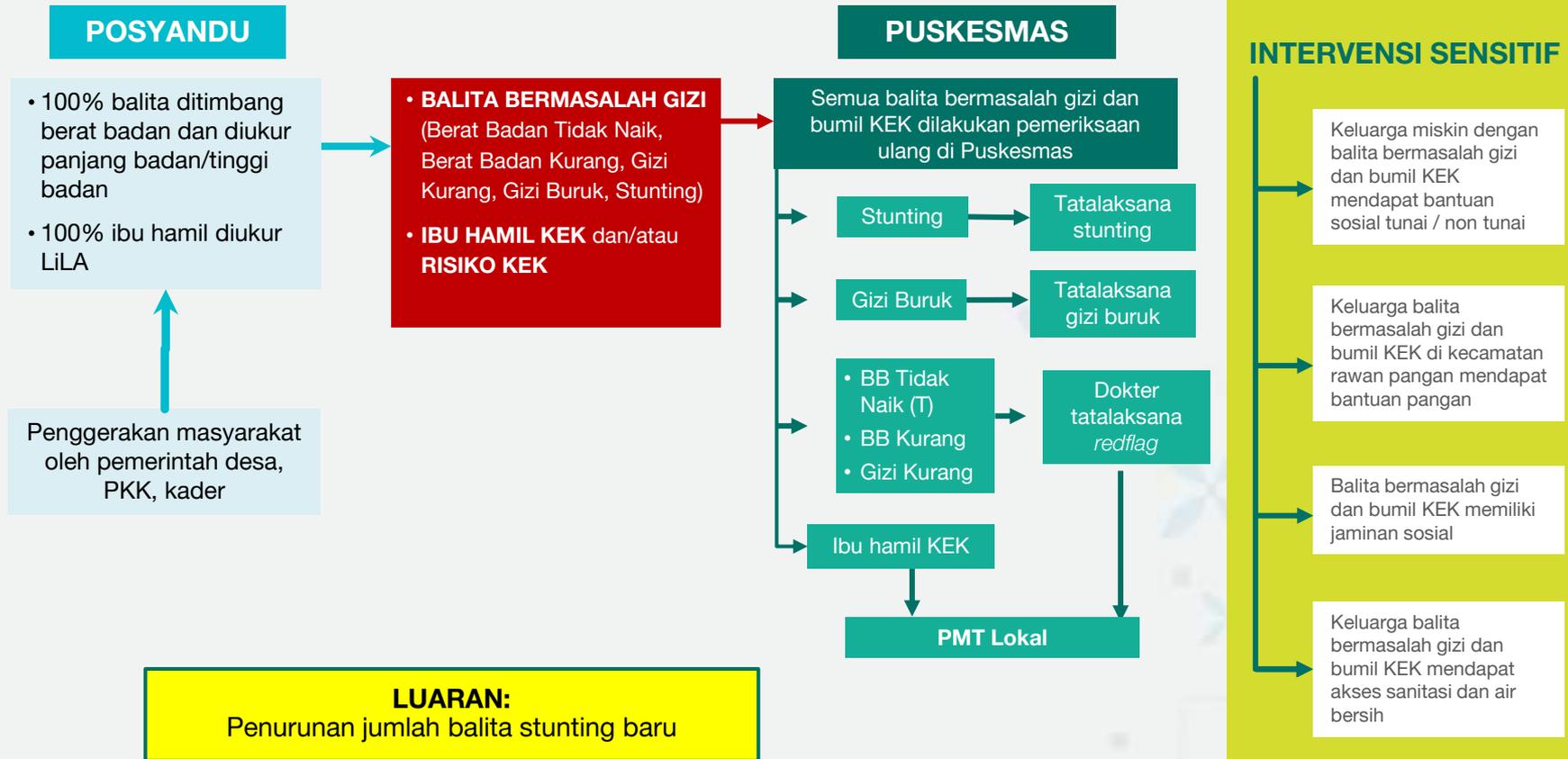
PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

GERAKAN PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

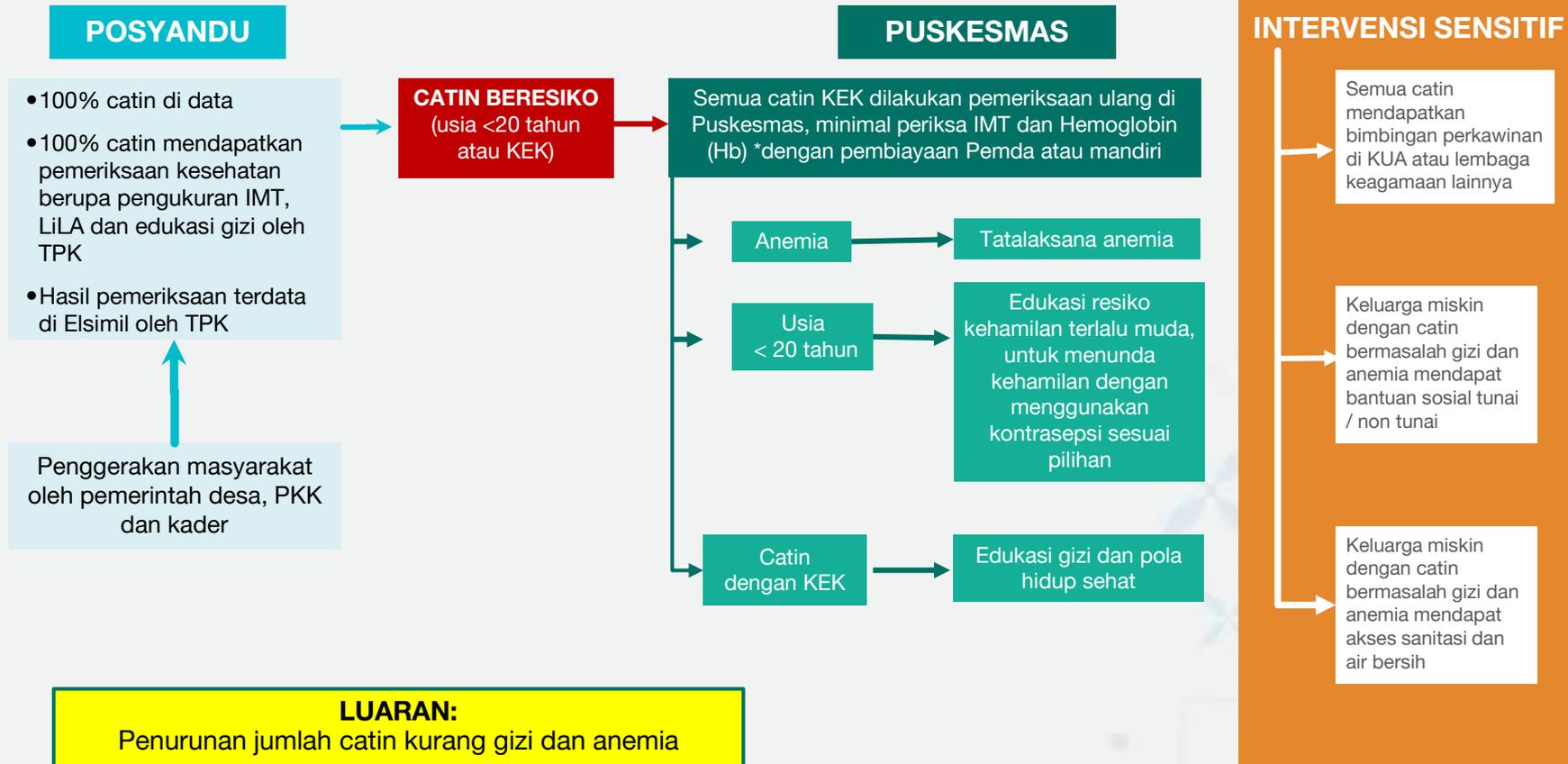
Aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, verifikasi, intervensi dan edukasi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin).



ALUR PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK: IBU HAMIL DAN BALITA



ALUR PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK: CALON PENGANTIN



PEMBAGIAN PERAN PENYELENGGARAAN

PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK
PENCEGAHAN STUNTING

10 ARAHAN KEMENDAGRI UNTUK Mendukung Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

- 1 Memastikan dilakukan pendataan seluruh catin, ibu hamil dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran
- 2 Memastikan seluruh catin, ibu hamil dan balita mendapatkan pendampingan serta memastikan datang ke posyandu
- 3 Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh posyandu
- 4 Memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk catin, ibu hamil dan balita
- 5 Memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar
- 6 Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi
- 7 Memastikan seluruh catin, ibu hamil, dan balita mendapat edukasi pencegahan stunting di posyandu
- 8 Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi (e-PPGBM) di hari yang sama
- 9 Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak
- 10 Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan

PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYELENGGARAAN

PUSAT

- Menyusun juknis pelaksanaan kegiatan
- Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan
- Menerbitkan Surat Edaran terkait pelaksanaan kegiatan di Tingkat Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas dan Posyandu
- Memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak dapat diaplikasikan hingga ke level Provinsi, Kab/Kota, dan Desa/Kelurahan (APBN, APBD, dll)
- Menetapkan alur pelaksanaan kegiatan termasuk rujukan
- Memastikan daerah telah memiliki alat antropometri sesuai standar yang terkalibrasi dan SDM terampil (sumber data K/L)
- Melakukan asistensi dan monitoring
- Melakukan evaluasi

PUSKESMAS

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Menetapkan sasaran riil bekerjasama dengan pemerintah desa atau kecamatan terkait di wilayahnya
- Memastikan posyandu memiliki alat antropometri sesuai standar dan terkalibrasi serta SDM yang terampil
- Melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan termasuk pembekalan tim pelaksana
- Melakukan pendampingan kepada kader
- Melakukan pencatatan dan pelaporan
- Melakukan monitoring dan evaluasi

PROVINSI

- Mengoordinasikan Kabupaten/Kota terkait:
 - a. Penetapan data sasaran
 - b. Penanggung jawab kegiatan sesuai tupoksi OPD yang terlibat
 - c. Ketersediaan alat antropometri sesuai standar yang terkalibrasi dan SDM pelaksana kegiatan yang terampil
 - d. Ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan
- Melakukan sosialisasi dan orientasi
- Melakukan asistensi dan monitoring
- Melakukan evaluasi

POSYANDU

- Berkoordinasi dengan Puskesmas dan Desa/Kelurahan
- Mendata seluruh sasaran di wilayahnya
- Melaksanakan kegiatan
- Melaksanakan edukasi kesehatan dan gizi
- Melaksanakan rujukan

KABUPATEN/KOTA

- Mengoordinasikan Puskesmas terkait:
 - a. Penetapan data sasaran
 - b. Penanggung jawab kegiatan sesuai tupoksi OPD yang terlibat
 - c. Ketersediaan alat antropometri sesuai standar yang terkalibrasi dan SDM pelaksana kegiatan yang terampil
 - d. Ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan
- Melakukan sosialisasi dan orientasi
- Melakukan asistensi dan monitoring
- Melakukan evaluasi

DESA

- Bersama Puskesmas menetapkan sasaran
- Melakukan penggerakan sasaran
- Mendukung pelaksanaan kegiatan
- Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
- Memastikan tersedianya alokasi APBDes untuk pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK
PENCEGAHAN STUNTING

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK

PERENCANAAN & PERSIAPAN

- Mengoordinasikan pelaksanaan persiapan pengukuran dan intervensi serentak oleh K/L
- Memfasilitasi persiapan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak di tingkat pimpinan K/L
- Memastikan pembagian penanggung jawab anggaran
- Memastikan ketersediaan data sasaran
- Memastikan ketersediaan alat antropometri sesuai standar dan melakukan kalibrasi
- Melakukan penilaian keterampilan kader
- Memastikan anggaran PMT pemulihan pangan lokal
- Menginstruksikan partisipasi aktif pada OPD di tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Desa/Kelurahan
- Memastikan monitoring dan evaluasi berjalan
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat
- Menyampaikan informasi ke seluruh ibu hamil, keluarga dengan balita dan catin agar datang ke posyandu sebelum hari pelaksanaan kegiatan

PELAKSANAAN

- Menggerakkan masyarakat agar semua ibu hamil, balita dan catin hadir ke posyandu
- Mengukur LiLA pada ibu hamil dan pengukuran IMT dan LiLA pada catin, penimbangan BB balita serta pengukuran PB/TB balita di Posyandu dengan alat antropometri terstandar yang telah dikalibrasi
- Melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil, balita dan catin yang tidak hadir (menggerakkan untuk hadir ke Posyandu atau penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar)
- Melakukan pencatatan dan pelaporan di hari yang sama
- Melakukan verifikasi data untuk ibu hamil, balita dan catin dengan hasil pengukuran yang tidak normal
- Melakukan Rujukan penemuan masalah ke Puskesmas

PENCATATAN & PELAPORAN

Input data di Posyandu di hari yang sama:

- penimbangan BB dan pengukuran PB/TB balita
- penimbangan BB dan pengukuran TB catin
- pengukuran LiLA ibu hamil dan catin

Input data pemantauan

PMT:

- Pemberian PMT (setiap hari)
- BB balita (setiap minggu)
- PB/TB balita (setiap bulan)
- BB ibu hamil (setiap bulan)

MONITORING & EVALUASI

- Monitoring harian penimbangan dan pengukuran (melalui *dashboard*)
- Monitoring pelaksanaan di posyandu oleh TPPS desa/kelurahan
- Evaluasi (pertengahan Juni dan awal Juli)

Pelaksanaan Kegiatan di Posyandu



Langkah 1 Pendaftaran

- Kader melakukan pendaftaran ibu hamil dan balita menggunakan Kartu Bantu Pemeriksaan Posyandu dan Buku KIA.
- TPK melakukan pendaftaran catin menggunakan buku pendaftaran.

Langkah 2 Penimbangan BB & Pengukuran PB/TB

- Kader menimbang berat badan dan mengukur panjang badan/tinggi badan balita menggunakan alat antropometri terstandar dan telah terkalibrasi.
- Kader mengukur LiLA ibu hamil.
- TPK menimbang berat badan, mengukur tinggi badan serta LiLA catin.

Langkah 3 Pencatatan

- Kader didampingi Tenaga Kesehatan Puskesmas melakukan *plotting* hasil penimbangan dan pengukuran.
- Kader menjelaskan kesimpulan kepada sasaran.
- Kader merujuk ibu hamil dan balita yang memiliki hasil penimbangan dan pengukuran tidak normal.
- TPK memasukkan data hasil penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan LiLA Catin ke dalam Elsimil.

Langkah 4 Pelayanan Bumil KEK & Balita Bermasalah Gizi

- Tenaga kesehatan melakukan verifikasi kesimpulan hasil penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan dan lingkaran lengan atas.
- Tenaga kesehatan merujuk ibu hamil, balita dan catin dengan masalah gizi yang membutuhkan tindak lanjut di Puskesmas.

Langkah 5 Penyuluhan Kesehatan

- Kader memberikan edukasi ibu hamil dan balita tentang konsumsi makanan utama (Isi Piringku Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, Bayi dan Balita, ASI dan MP ASI), rujukan ibu hamil dan balita bermasalah gizi untuk mendapat penanganan tenaga kesehatan berupa makanan tambahan pemulihan dan monitor berat badan.
- TPK memberikan edukasi kepada catin tentang gizi dan pola hidup sehat.

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

PERSIAPAN



Persiapan Kementerian/Lembaga

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Sekretariat Kantor Wakil Presiden	1.Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2.Memfasilitasi persiapan kegiatan di tingkat Kementerian/Lembaga.
2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan (PMK)	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan dan rencana monitoring di tingkat Kementerian/Lembaga.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Memastikan perencanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
4.	Kementerian Keuangan	1.Mendukung program kegiatan penurunan prevalensi stunting melalui Transfer Ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan penggunaan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan terkait stunting, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - DAK (DAK Fisik, DAK Non Fisik) - Dana Desa - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Bidang Kesehatan 2.Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kegiatan Pemerintah Daerah dan Desa bersama dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait atas pemanfaatan TKD tersebut.

Persiapan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
5.	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.
6.	Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. 3. Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar. 4. Memastikan ketersediaan anggaran PMT pemulihan pangan lokal. 5. Memastikan ketersediaan kader yang terampil.
7.	BKKBN - Sekretariat TPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Menginstruksikan pergerakan sasaran. 3. Melakukan sosialisasi rencana pengukuran dan intervensi serentak kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) dan seluruh TPPS untuk memonitor proses persiapan dan pelaksanaannya. 4. Penyediaan data Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Persiapan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
8.	Kementerian Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Memastikan seluruh sasaran dari keluarga miskin masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. 3. Menginstruksikan Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam penentuan sasaran bantuan tunai/non tunai keluarga miskin dengan balita dan ibu hamil bermasalah gizi.
9.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi dan Kab/Kota, dan pendamping desa untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak melalui dana desa sesuai kewenangan desa.
10.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Mengoordinasikan Dinas Pendidikan untuk partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA untuk hadir ke Posyandu.

Persiapan



NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. 2. Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menysasar wilayah keluarga berisiko stunting agar memperoleh akses air minum dan sanitasi.
12.	Kementerian Komunikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media elektronik berupa penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), baik berupa audio maupun video. 2. Mengoordinasikan Dinas Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia untuk menyebarkan informasi kegiatan. 3. Penyebarluasan informasi kegiatan melalui <i>SMS Broadcast</i>.
13.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. 2. Mendukung keikutsertaan masyarakat pesisir/pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ke posyandu dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting.
14.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) fortifikasi pangan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaku usaha terkait. 2. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan kader keamanan pangan desa dan bimbingan teknis kepada komunitas pada program desa pangan aman dengan UPT.

Persiapan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
15.	Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan melalui Surat Edaran kepada seluruh Kantor Wilayah Agama dan pimpinan KUA serta Lembaga Agama lainnya untuk melaksanakan pencegahan stunting dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. 2. Mengoordinasikan Kantor Wilayah Agama agar memastikan setiap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan mendapatkan bimbingan perkawinan.
16.	Badan Pangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 2. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota dan pendamping kelompok. 3. Sosialisasi ke pendamping terkait pemberian makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagai intervensi pencegahan stunting. 4. Menganalisis keberlanjutan kegiatan (sumber pendanaan). 5. Pemberian bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting (KRS).
17.	TNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan ke Kodam, Kodim, Koramil, Babinsa, untuk aktif mendatangi sasaran ke Posyandu dan menjangkau sasaran kunjungan rumah bersama kader, tenaga kesehatan, dan aparat desa. 2. Pembagian tugas di wilayah masing-masing.
18.	Polri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan ke Polda, Polres, Polsek, dan Babinkamtibmas untuk aktif mendatangi sasaran ke Posyandu dan menjangkau sasaran kunjungan rumah bersama kader, tenaga kesehatan, dan aparat desa. 2. Pembagian tugas di wilayah masing-masing.

Persiapan TPPS Tingkat Provinsi

PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
TPPS Tingkat Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan.2. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota.3. Meneruskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan.4. Memastikan pembagian penanggung jawab anggaran untuk:<ol style="list-style-type: none">a) Pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak di Posyandu.b) Kunjungan rumah ibu hamil, balita dan catin yang tidak hadir ke Posyandu.c) Pendampingan rujukan kasus.d) Pemantauan PMT pemulihan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi.e) Pelaksanaan rapat koordinasi rutin.f) Penyediaan bantuan pendukung lainnya.

Persiapan Kabupaten/Kota

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Mengoordinasikan pembagian penanggung jawab anggaran untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. b. Kunjungan rumah ibu hamil, balita dan catin yang tidak hadir ke Posyandu. c. Pendampingan rujukan kasus. d. Pemantauan PMT pemulihan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi. e. Pelaksanaan rapat koordinasi rutin. f. Penyediaan bantuan pendukung lainnya.
2.	Sekretariat Daerah (Sekda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat koordinasi menindaklanjuti instruksi Mendagri. 2. Mengoordinasi penyiapan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di wilayahnya. 3. Mengoordinasikan dan memastikan data sasaran.

Persiapan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
3.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan alat antropometri sesuai standar. 2. Mengoordinasikan kelayakan dan kalibrasi alat antropometri. 3. Memastikan ketersediaan anggaran PMT pemulihan pangan lokal. 4. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian keterampilan kader. 5. Menyiapkan media edukasi.
4.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Tenaga Ahli Satgas BKKBN Provinsi dan Kab/Kota, TPPS Provinsi dan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan penugasan Tim Pendamping Keluarga (TPK). 2. Mengoordinasikan pembagian tugas monitoring pelaksanaan kegiatan.
5.	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk penentuan sasaran bantuan tunai/non tunai keluarga miskin dengan balita dan ibu hamil bermasalah gizi. 2. Penyiapan anggaran dan proses persiapan pemberian bantuan.
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting. 2. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa untuk mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam mendata dan memantau cakupan layanan yang diterima sasaran selama pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Desa. 3. Memantau tersedianya alokasi APBDes untuk kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di wilayahnya.

Persiapan

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
7.	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan partisipasi aktif peserta didik usia balita di satuan PAUD/TK/RA untuk hadir ke Posyandu. 2. Mengoordinasikan satuan PAUD/TK/RA agar sasaran balita hadir di Posyandu. 3. Melakukan pendataan jumlah sasaran balita di PAUD/TK/RA.
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penentuan sasaran bantuan akses sarana air bersih dan sanitasi. 2. Penyiapan anggaran dan proses persiapan pemberian bantuan.
9.	Kantor Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam penentuan sasaran bantuan pangan 2. Penyiapan anggaran dan proses persiapan pemberian bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting (KRS) 3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terkait bantuan pangan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Melakukan sosialisasi kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting
11.	Kanwil Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting (bekerjasama dengan posyandu) dan kesehatan reproduksi bagi remaja serta bimbingan perkawinan bagi catin (bekerjasama dengan Puskesmas dan P2KB) 2. Mengoordinasikan KUA melalui Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN **PELAKSANAAN**



Pelaksanaan Kementerian/ Lembaga

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Sekretariat Kantor Wakil Presiden	1. Memfasilitasi koordinasi pemantauan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak di tingkat pimpinan K/L. 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak di daerah.
2.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)	Bersama Kementerian dan Lembaga memonitor pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak.
3.	Kantor Staf Presiden	Bersama Kementerian dan Lembaga memonitor pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak.
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Melakukan pemantauan rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian / Lembaga.
5.	Kementerian Keuangan	Memonitor dan mengevaluasi anggaran dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting hingga tingkat desa.

Pelaksanaan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
6.	Kementerian Dalam Negeri	Memonitor pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak tingkat provinsi, dengan fokus pada 10 arahan Mendagri yang telah diinstruksikan.
7.	Kementerian Kesehatan	Memonitor pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak dengan fokus pada data pencatatan pelaporan yang masuk, data masalah gizi, pemberian intervensi makanan tambahan, dan perbaikan gizi sasaran yang sudah mendapat intervensi.
8.	BKKBN, Sekretariat TPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor fasilitasi TPPS dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak serta kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan fokus pada peningkatan capaian target sasaran yang ditimbang dan diukur, mendapat edukasi pencegahan stunting, menjalani rujukan dan mendapatkan intervensi, serta didampingi oleh TPK 2. Memonitor partisipasi aktif TPK dalam pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting
9.	Kementerian Sosial	Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan tunai/non tunai dengan fokus pada pembaharuan jumlah penerima bantuan.
10.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Memonitor penggunaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu.

Pelaksanaan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
11.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Memonitor laporan kemajuan jumlah balita di PAUD/TK/RA yang telah menjadi sasaran penimbangan dan pengukuran.
12.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
13.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Memonitor penyebarluasan informasi pengukuran dan intervensi serentak di masyarakat, kemajuan capaian target catin, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur serta mendapat edukasi pencegahan stunting.
14.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memonitor keikutsertaan masyarakat pesisir/pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ke Posyandu dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak.
15.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pelaksanaan pemeriksaan sarana UMK fortifikasi Pangan dengan UPT dan pelaku usaha terkait 2. Memonitor pelaksanaan pelatihan kader keamanan pangan desa dan bimbingan teknis kepada komunitas pada program desa pangan aman dengan UPT

Pelaksanaan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
16.	Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA dan lembaga keagamaan lainnya. 2. Memonitor pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun mandiri.
17.	Badan Pangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan pangan dengan fokus pada update jumlah penerima bantuan. 2. Memonitor pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
18.	TNI dan Polri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan dan memfasilitasi sasaran dengan akses yang sulit untuk hadir di Posyandu maupun yang dirujuk melalui partisipasi anggota di lapangan. 2. Memonitor kemajuan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak dengan fokus pada kemajuan capaian target ibu hamil dan balita yang ditimbang dan diukur serta catin yang didampingi.

Pelaksanaan Tingkat Provinsi

PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
TPPS Provinsi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="556 328 1773 401">1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh kabupaten/kota.<li data-bbox="556 416 1213 456">2. Memberikan asistensi bagi kabupaten/kota



Pelaksanaan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Memonitor penggunaan anggaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah (Sekda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor kemajuan jumlah balita, ibu hamil dan catin ditimbang dan diukur, dirujuk, dan mendapatkan intervensi. 2. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan intervensi sesuai kewenangan.
3.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. 2. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 3. Memastikan antropometri terstandar telah tersedia dan terkalibrasi di semua Posyandu. 4. Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar dan pemberian edukasi pencegahan stunting. 5. Memonitor data pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan intervensi serentak. 6. Memonitor data masalah gizi dan pemberian makanan tambahan pada sasaran yang tepat. 7. Memonitor kemajuan perbaikan status gizi sasaran yang sudah mendapat intervensi. 8. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan intervensi sesuai kewenangan.

Pelaksanaan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
4.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Tenaga Ahli Satgas BKKBN Kab/Kota, TPPS Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. 2. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 3. Memonitor partisipasi TPPS dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. 4. Memonitor partisipasi TPK dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. 5. Memonitor kemajuan capaian target sasaran didampingi, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur, balita dan ibu hamil yang menjalani rujukan dan mendapatkan intervensi. 6. Menginstruksikan TPPS Kecamatan untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
5.	Dinas Sosial	Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan tunai/non tunai dengan fokus pada pembaharuan jumlah penerima bantuan.
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor pengalokasian APBDDes untuk mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. 2. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. 3. Memonitor komitmen Pemerintah Desa dan Pelaku di Desa lainnya dalam mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak. 4. Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan pengukuran dan intervensi sesuai kewenangan.

Pelaksanaan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
7.	Dinas Pendidikan	Memonitor laporan kemajuan jumlah balita di Satuan PAUD/TK/RA yang telah menjadi sasaran penimbangan pengukuran.
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Memastikan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
9.	Kantor Ketahanan Pangan	Memonitor kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan pangan dengan fokus pada pembaharuan jumlah penerima bantuan.
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Memonitor kemajuan capaian target catin didampingi, balita dan ibu hamil yang ditimbang dan diukur dan mendapat edukasi.
11.	Kantor Wilayah Agama	Melaksanakan pendampingan bersama Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pembinaan catin di wilayah kerja KUA.

Pelaksanaan Tingkat Kecamatan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	TPPS Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memonitor cakupan sasaran yang mendapat pelayanan di Posyandu sesuai target.2. Memonitor pelaksanaan intervensi serentak di wilayahnya melalui Pokjanal Posyandu.3. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu.
2.	Puskesmas	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu.2. Mendampingi proses penimbangan dan pengukuran ibu hamil dan balita.3. Bersama kader melakukan edukasi pencegahan stunting pada ibu hamil, balita dan catin.4. Menindaklanjuti rujukan hasil penimbangan dan pengukuran.5. Melakukan verifikasi data hasil penimbangan dan pengukuran pada sasaran yang bermasalah gizi.6. Melakukan pemeriksaan status kesehatan termasuk <i>red flag</i> dan pemberian intervensi pada ibu hamil KEK/resiko KEK, balita bermasalah gizi dan catin berisiko KEK.7. Berkoordinasi dengan kader untuk melakukan pemantauan intervensi pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi.8. Melakukan pencatatan dan pelaporan lengkap pada sistem informasi di hari yang sama, mulai dari hasil penimbangan dan pengukuran, rujukan kasus, hingga intervensi.

Pelaksanaan Tingkat Kelurahan/ Desa

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1.	Pemerintah Desa/ Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="614 325 1825 398">1. Melakukan penggerakan seluruh sasaran ibu hamil, balita dan catin untuk datang ke Posyandu.<li data-bbox="614 412 1825 485">2. Mendampingi kegiatan penimbangan dan pengukuran ibu hamil, balita, dan catin di Posyandu.<li data-bbox="614 500 1825 573">3. Memastikan pelaksanaan kunjungan rumah pada ibu hamil, balita dan catin yang tidak datang ke Posyandu dan mengawal pelaksanaan kunjungan rumah.<li data-bbox="614 587 1825 660">4. Memastikan ibu hamil, balita dan catin yang harus dirujuk datang ke Puskesmas, mendapatkan intervensi dan terpantau.

Pelaksanaan

No.	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
2.	Kader (Posyandu, KPM, TPK)	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penimbangan dan pengukuran.2. Melakukan <i>plotting</i> dan interpretasi hasil penimbangan dan pengukuran.3. Melakukan edukasi pencegahan stunting bersama nakes.4. Melakukan rujukan bila dari hasil penimbangan ditemukan ibu hamil, balita dan catin berisiko masalah gizi.5. Melakukan kunjungan rumah untuk sasaran yang tidak hadir ke Posyandu.6. Melakukan pemantauan intervensi pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi.7. Melakukan pencatatan dan pelaporan.8. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Puskesmas bila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan



SISTEM PELAPORAN

Langkah Langkah Pencatatan dan Pelaporan

- Puskesmas melakukan pemutakhiran data sasaran riil bulan Juni : balita (ePPGBM) dan ibu hamil (eKohort maupun ePPGBM).
- Data sasaran Balita akan terekap di ePPGBM dan sasaran ibu hamil terekap di eKohort dan ePPGBM.
- Tim pelaksana melakukan penimbangan dan pengukuran BB dan TB/PB sasaran balita kemudian melaporkan hasilnya di ePPGBM.
- Tim pelaksana melakukan pengukuran LiLA ibu hamil dan mencatat hasilnya di Buku KIA dan melaporkan di eKohort.

Tindak lanjut sasaran bermasalah gizi.

- Tim pelaksana mencatat hasil pemantauan PMT pada ibu hamil dan balita.
- Tim pelaksana mencatat hasil pemantauan PMT pada formulir pemantauan PMT, Buku KIA dan dilaporkan secara elektronik melalui Sigizi Terpadu pada menu Pemantauan PMT.
- Melakukan pemantauan harian melalui *dashboard* “Pengukuran dan Intervensi Serentak Stunting”.

SISTEM PELAPORAN

Langkah Langkah Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan Antropometri Kit

- Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas melakukan inventarisasi ketersediaan alat antropometri yang sesuai standar di posyandu dan melakukan kalibrasi.
- Puskesmas menginputkan data ketersediaan antropometri kit sesuai standar ke Sigizi Terpadu pada modul Laporan Rutin (Kelengkapan Posyandu).
- Puskesmas menginputkan data antropometri kit yang sudah dikalibrasi ke Sigizi Terpadu pada modul Laporan Rutin (Kelengkapan Posyandu).

Pencatatan dan Pelaporan Kader

- Kader mencatatkan jumlah sasaran ibu dan balita, hasil penimbangan, pengukuran tindakan rujukan pada kartu bantu posyandu, dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Puskesmas.
- Kader mencatatkan jumlah sasaran kunjungan rumah, hasil kunjungan rumah, tindakan rujukan pada kartu kunjungan rumah,, dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Puskesmas.
- Puskesmas (Pj Promkes) mencatatkan cakupan kunjungan posyandu, kunjungan rumah dan jumlah rujukan pada aplikasi Microsite.
- TPK melakukan penimbangan BB dan pengukuran TB dan LiLA catin dan menginput ke Elsimil

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

EVALUASI



EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil kegiatan mencakup:

1. Persentase ibu hamil, balita dan catin datang ke posyandu
2. Persentase ibu hamil diukur lingkar lengan atas (LiLA)
3. Persentase catin diukur LiLA, BB dan TB
4. Persentase balita ditimbang berat badan (BB) dan diukur panjang badan (PB) atau tinggi badan (TB) menggunakan alat antropometri terstandar yang terkalibrasi
5. Persentase ibu hamil KEK
6. Persentase balita bermasalah gizi
7. Persentase ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan lokal
8. Persentase balita bermasalah gizi mendapatkan makanan tambahan lokal
9. Persentase catin mendapatkan bimbingan perkawinan
10. Persentase catin KEK

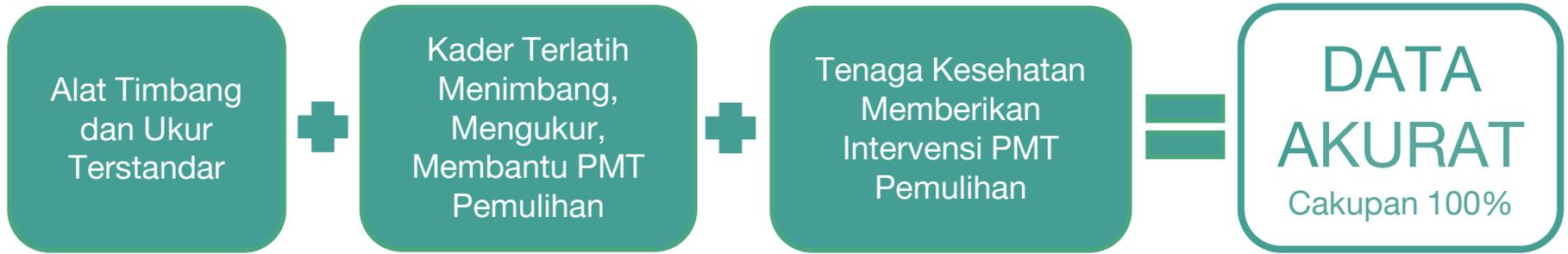


Hasil Evaluasi didiseminasikan pada bulan Juli 2024.

LAMPIRAN

- Kualitas Data Penting untuk Intervensi Serentak yang Tepat Sasaran
- Intervensi Pelayanan Posyandu pada Ibu Hamil
- Intervensi Pelayanan Posyandu pada Balita
- Intervensi Pelayanan Puskesmas pada Ibu Hamil KEK dan Balita Bermasalah Gizi
- Penyiapan Kader Posyandu
- *Dashboard* Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024
- Tautan Informasi Kegiatan

KUALITAS DATA PENTING UNTUK INTERVENSI SERENTAK YANG TEPAT SASARAN



- Kalibrasi alat timbang dan ukur
- Jumlah kader terlatih menimbang dan mengukur
- Jumlah sasaran balita, proses menemukan sasaran
- Intervensi PMT pemulihan oleh nakes dan monitoring

TITIK KRITIS

INTERVENSI PELAYANAN POSYANDU PADA IBU HAMIL



DETEKSI DINI DAN PENEMUAN KASUS

Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Ibu hamil yang mempunyai **Indeks Massa Tubuh Pra Hamil** atau pada **Trimester 1 (< 12 minggu)** sebesar $< 18.5 \text{ kg/m}^2$

Ibu Hamil Risiko KEK

Ibu hamil yang mempunyai ukuran **Lingkar Lengan Atas (LiLA)** kurang dari **23.5 cm**



PENGUKURAN LINGKAR LENGAN ATAS (LILA) PADA IBU HAMIL

Pengukuran lingkaran lengan atas (LiLA) pada ibu hamil dilakukan untuk mengetahui **risiko kurang energi kronis (KEK)**.

Ibu Hamil Risiko KEK adalah Ibu hamil yang mempunyai ukuran **Lingkar Lengan Atas (LiLA)** kurang dari **23,5 cm**.



Pengukuran LiLA dapat menggunakan

1. Pita LiLA ibu hamil
2. Meteran/metlin (dengan satuan cm)

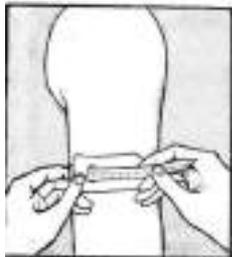


CARA MENGUKUR LINGKAR LENGAN ATAS (LILA) PADA IBU HAMIL

Ukur LiLA pada Lengan Bagian Atas:



1. Ukur LiLA pada lengan yang lebih tidak dominan.
2. Pastikan lengan ibu tidak tertutup pakaian.
3. Tekuk lengan sehingga tangan berbentuk siku.



4. Tentukan titik tengah lengan atas dengan mengukur pertengahan antara bahu dan siku.
5. Lingkarkan pita LiLA dengan pas (tidak terlalu ketat atau longgar) dalam posisi lengan tidak ditekuk.

HASIL PENGUKURAN LILA DICATATKAN DI BUKU KIA



EVALUASI KESEHATAN IBU HAMIL

Kendali Kesehatan Ibu
Tanggal periksa:

TT	OT	DNT			
BB	kg	Kuning	Normal	Cerah	Merah
Lila	OT				

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Hipertensi	Ya/No
Jantung	TB
Tiroid	Hepatitis B
Alergi	Jawa
Autisme	SIBIS
Diabetes	
Lainnya	

Ingkat pilihan yang sesuai

Riwayat Kehamilan dan Persalinan (termasuk Keguguran, Kembar, dan Lahir Mati)

Status Imunisasi Td

TT	selang waktu	perlindungan	✓
1		andi	
2	1 bulan	3 tahun	
3	6 bulan	5 tahun	
4	12 bulan	10 tahun	
5	12 bulan	>25 tahun	

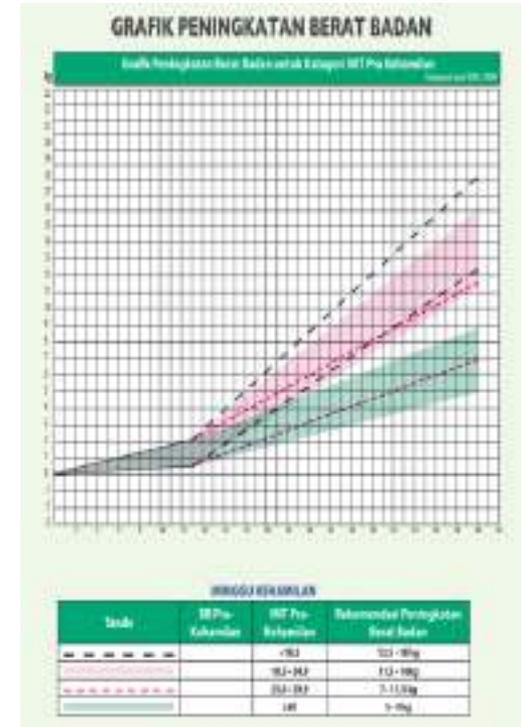
Keputusan Status imunisasi
Imunisasi lainnya: COVID-19

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan sebelum hamil

membok	poli makan berisiko	Aktivitas Suk karang
alkohol	obat teratogenik	kontak yang mengandung zat berbahaya

Lingkungan berisiko: pesibid/ lainnya

Ingkat pilihan yang sesuai
Lain-lain, jelaskan



INTERVENSI PELAYANAN POSYANDU PADA BALITA



Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1919/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1182/2022 tentang **Standar Alat Antropometri** dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak

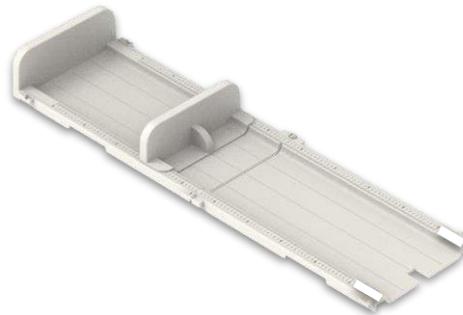
Alat ukur berat badan bayi (*baby scale*) dan balita



Alat ukur lingkaran lengan atas dan lingkaran kepala



Alat ukur panjang badan (*infantometer/ length board*)



Alat ukur tinggi badan (*stadiometer*)



CARA MELAKUKAN KALIBRASI ALAT ANTROPOMETRI

- Alat ukur berat badan bayi (*baby scale*) dan balita
- Alat ukur berat badan injak digital (*standing weight*)

- Timbangan digital dikalibrasi dengan cara menimbang anak timbangan dalam berat yang tervalidasi dan bervariasi sesuai dengan kapasitas timbangan.
- Pada waktu kalibrasi, harus dipastikan timbangan menunjukkan angka yang sesuai dengan berat anak timbangan yang diukur.



- Alat ukur panjang badan (*infantometer*)
- Alat ukur tinggi badan (*stadiometer*)

- Alat ukur harus dikalibrasi dengan cara mengukur tongkat yang memiliki ukuran panjang tertentu yang tervalidasi dan bervariasi.
 - Tongkat terbuat bahan dari bahan yang kuat, solid dan tidak memuai.
 - Pada waktu kalibrasi, harus dipastikan hasil pengukuran menunjukkan angka yang sesuai dengan panjang tongkat yang diukur.

PELAKSANAAN PENIMBANGAN DAN PENGUKURAN DENGAN ANTROPOMETRI KIT

Penimbangan berat badan bayi dan balita



Saat akan ditimbang, pastikan bayi/balita **tidak memakai popok** dan **pakaian seminimal mungkin** serta **tidak memegang sesuatu**

Pengukuran panjang badan



Posisi bayi sudah lurus dan telapak menyentuh papan pembatas kaki

Saat akan diukur, pastikan bayi/balita **tidak menggunakan alas kaki** (sepatu/sandal, kaos kaki) dan **tidak menggunakan penutup kepala**

Pengukuran tinggi badan



5 bagian tubuh menempel:

- Kepala
- Bahu
- Pantat
- Betis
- Tumit

Posisi tumit menempel pada sandaran kaki dan pandangan lurus ke depan

PELAKSANAAN PENIMBANGAN DAN PENGUKURAN DENGAN ANTROPOMETRI KIT

Pengukuran lingkaran kepala



Saat akan diukur, pastikan bayi/balita **tidak menggunakan aksesoris/hiasan rambut dan penutup kepala**

Alat pengukur dilingkarkan pada kepala balita **melewati dahi, di atas alis mata, di atas kedua telinga, dan bagian belakang kepala yang menonjol**, tarik agak kencang

Pengukuran Lingkaran Lengan Atas (LiLA)



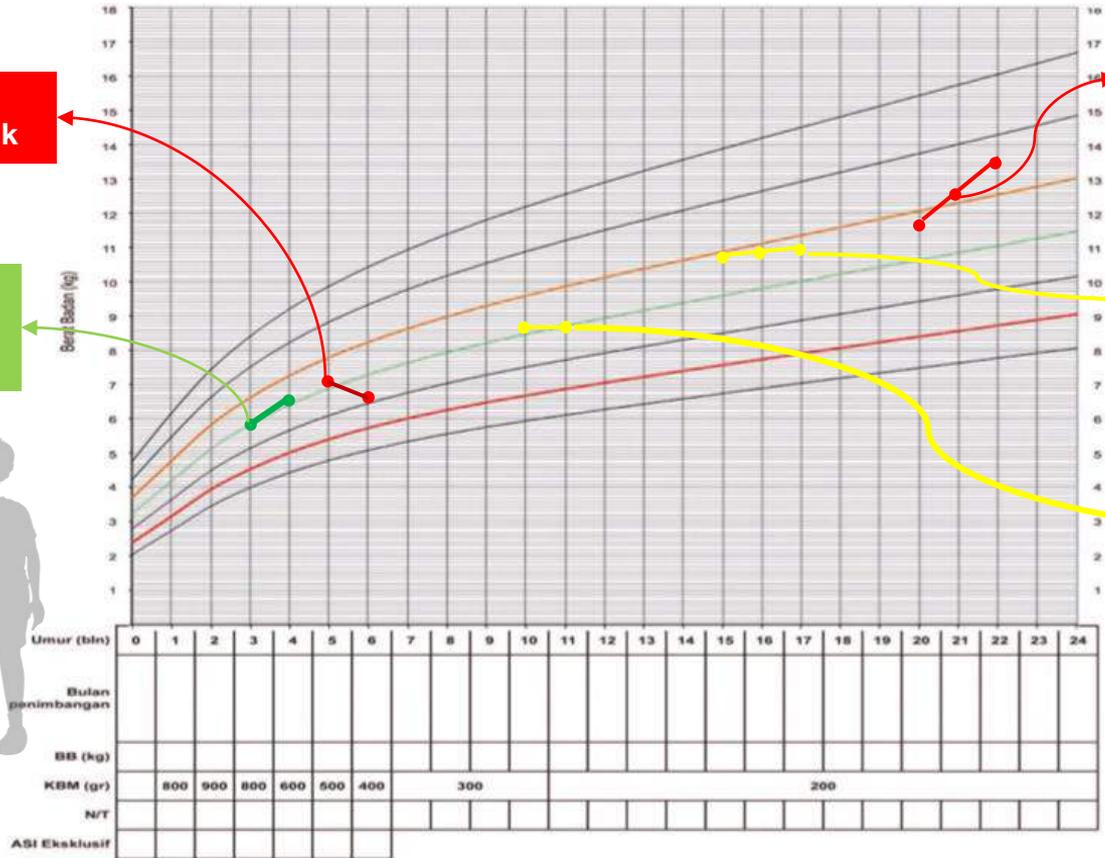
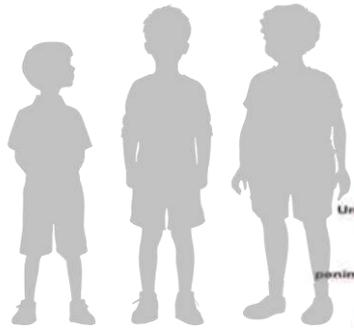
Saat akan diukur, pastikan lengan bayi/balita yang akan diukur **tidak tertutup pakaian**

- Tentukan titik tengah lengan atas dengan cara:
 1. Tekuk lengan balita hingga membentuk sudut 90o, telapak tangan menghadap ke atas.
 2. Cari titik ujung bahu dan ujung siku lengan.
 3. Ukur panjang antara kedua titik tersebut dan bagi dua untuk mendapatkan nilai tengah.
 4. Tandai titik tengah dengan menggunakan pena/spidol.
- Luruskan lengan anak, sejajar dengan badan.
- Lingkarkan alat ukur di titik tengah yang sudah ditandai dan pastikan menempel rata sekeliling kulit, tidak terlalu ketat atau terlalu longgar.

MENJELASKAN HASIL PENIMBANGAN BERAT BADAN DAN RUJUKAN KE PUSKESMAS

BB turun :
Pertumbuhan tidak baik

BB naik mengikuti garis pertumbuhan, artinya
Pertumbuhan baik



BB naik melebihi garis oranye, artinya
Pertumbuhan tidak baik

BB naik tapi tidak memadai:
Pertumbuhan Tidak baik

BB tetap / mendatar:
Pertumbuhan Tidak baik



Deteksi Dini dan Rujukan Masalah Gizi Balita

Jika ditemukan Balita T, rujuk ke Puskesmas untuk konfirmasi status gizi serta tata laksana masalah gizi dan penyakit penyerta

Berat Badan Tidak Naik (T)

Berat Badan Tidak Naik (T) terdiri dari:



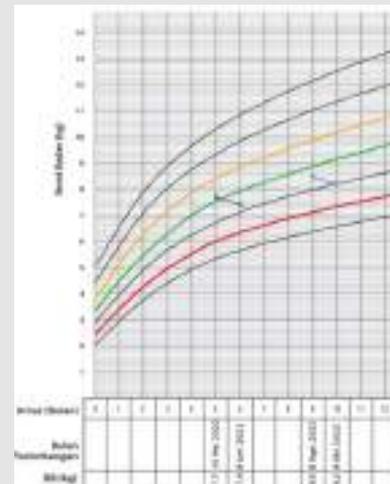
Berat badan naik tidak adekuat

- Hasil penimbangan BB meningkat dari sebelumnya, namun kenaikannya tidak cukup sesuai usia dan jenis kelamin
- Arah garis pertumbuhan tidak mengikuti garis pertumbuhan normal (sedikit menjauh).



Berat badan tetap

- Hasil penimbangan BB sama dengan sebelumnya
- Arah garis pertumbuhan mendatar



Berat badan turun

- Hasil penimbangan BB menurun dibandingkan bulan sebelumnya
- Arah garis pertumbuhan menjauh dari garis pertumbuhan normal

MEJA 2
(PENIMBANGAN)



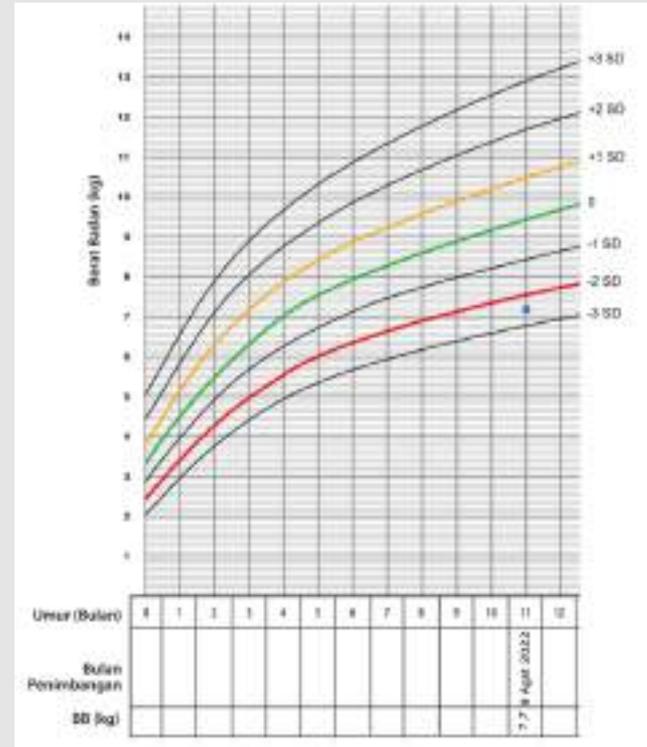
Deteksi Dini dan Rujukan Masalah Gizi Balita

Jika ditemukan Balita BB kurang (BGM), rujuk ke Puskesmas untuk konfirmasi status gizi serta tata laksana masalah gizi dan penyakit penyerta

Berat Berat Badan Kurang

Underweight / Bawah Garis Merah (BGM)

Balita dengan tanda:
BB/U¹ -3 SD s.d < -2 SD



MEJA 2

1 Berat Badan Menurut Umur

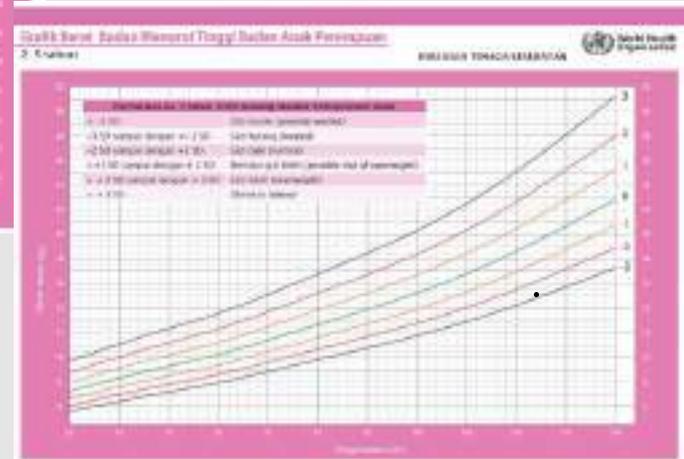
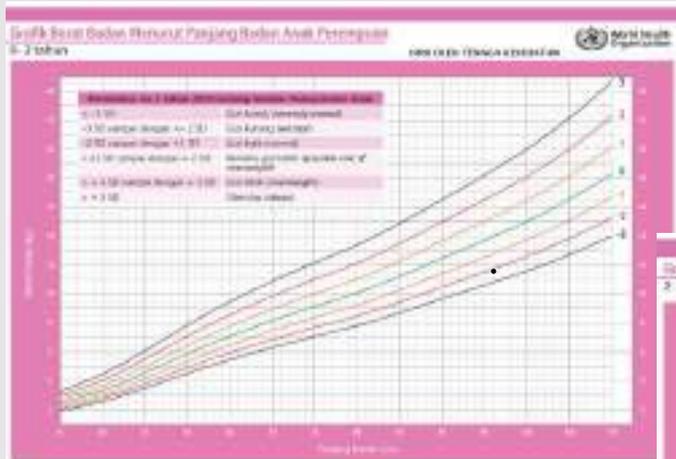


Deteksi Dini dan Rujukan Masalah Gizi Balita

Jika ditemukan Balita Gizi Kurang, rujuk ke Puskesmas untuk konfirmasi status gizi serta tata laksana masalah gizi dan penyakit penyerta

Balita Gizi Kurang

Balita dengan tanda:
BB/PB¹ atau BB/TB² -3 SD s.d <-2 SD



MEJA 2

- 1 Berat Badan Menurut Panjang Badan
- 2 Berat Badan Menurut Tinggi Badan



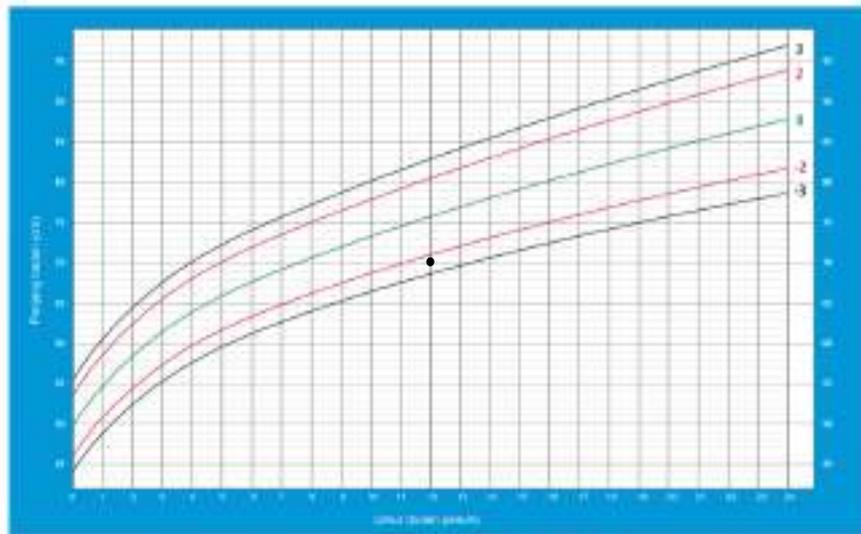
Deteksi Dini dan Rujukan Masalah Gizi Balita

Jika ditemukan Balita Stunting, rujuk ke Puskesmas untuk konfirmasi status gizi serta tata laksana masalah gizi dan penyakit penyerta

Balita Stunting

Balita dengan tanda:
 PB/U^1 atau $TB/U^2 < -2 SD$

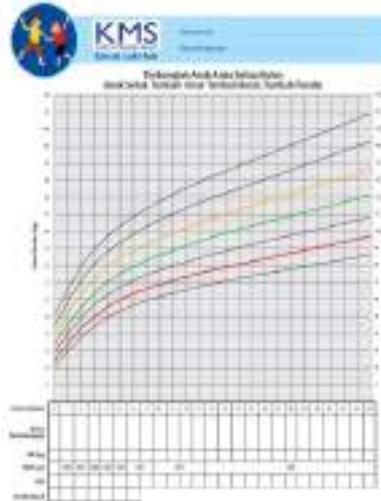
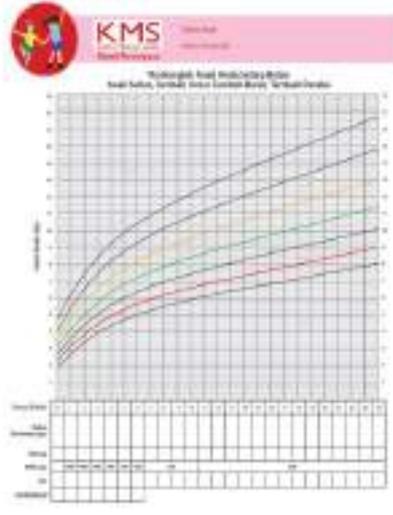
Grafik Panjang Badan Menurut Umur Anak Laki-laki: 0-24 Bulan (z-scores)



MEJA 2

- 1 Berat Badan Menurut Panjang Badan
- 2 Berat Badan Menurut Tinggi Badan

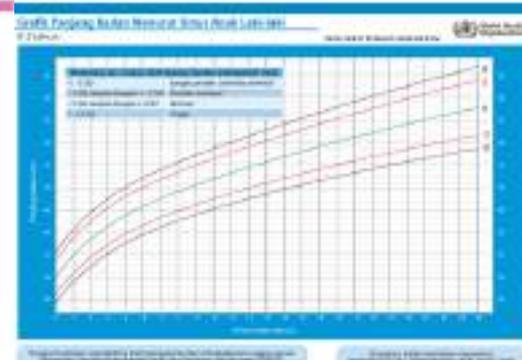
Hasil Pengukuran BB, PB/TB, dan LiLA dicatatkan di Buku KIA



PELAYANAN SDIOTX

Hasil Pemantauan Perkembangan Berdasarkan Buku KIA akan dicatat pada kardus KMS

Perkembangan (Lengkap atau Tidak lengkap)	Usia (bulan)	Deteksi Dini Penyimpangan Pertumbuhan					Deteksi Dini DPO
		BB/B (180 kg/ 94 kg)	BB/TB (180 kg/ 94 kg)	TB/B (180 kg/ 94 kg)	LiLA (180 kg/ 94 kg)	LiLA (180 kg/ 94 kg)	
	0						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
	45						
	46						
	47						
	48						
	49						
	50						
	51						
	52						
	53						
	54						
	55						
	56						
	57						
	58						
	59						
	60						



PELAYANAN SDIOTX

Usia (bulan)	BB/B (180 kg/ 94 kg)	BB/TB (180 kg/ 94 kg)	TB/B (180 kg/ 94 kg)	LiLA (180 kg/ 94 kg)	LiLA (180 kg/ 94 kg)	Deteksi Dini DPO
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

INTERVENSI PELAYANAN PUSKESMAS PADA IBU HAMIL KEK DAN BALITA BERMASALAH GIZI



Standar Makanan Tambahan Lokal untuk Ibu Hamil

Komposisi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dalam satu hari

Zat Gizi	Makanan Lengkap		Makanan Kudapan	
Energi	500 – 700 kkal		510 - 530 kkal	
Protein (gr)	18 - 23%	29 – 34 gram	18 - 23%	23 – 27 gram
Lemak (gr)	20 - 30%	14 – 24 gram	30 - 40%	19 – 23 gram ⁶⁹

- Makanan padat gizi mengandung protein hewani terdiri dari berupa sumber makanan pokok, sumber lauk pauk hewani dan nabati serta sayur dan buah
- Bahan makanan sumber protein hewani mengacu pada lampiran

Contoh Standar Bahan Makanan Tambahan Lokal bagi Ibu Hamil KEK yang disiapkan untuk 1 kali makan

Bahan Makanan	Makanan Kudapan		Makanan Lengkap	
	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)
Makanan Pokok (beras)	40	¼ gelas	75	¼ gelas
Lauk hewani 1 (telur)	60	1 butir besar	ikan 75g/ ayam 60 g/ telur 60 g/ daging 60 g	1 ekor/ 1 potong besar/ 1 butir besar/ 1 potong besar
Lauk hewani 2 (ayam/ikan/daging)	30-50	¼ potong sedang		
Lauk Nabati (kacang-kacangan/tempe/tahu)	25	3 sdm/ ¼ potong sedang	50	2 potong sedang
Sayur	50	¼ gelas ukuran 250 ml	100	1 gelas
Buah	60	1 buah ukuran sedang	100	1 buah ukuran besar/ 2 potong sedang
Minyak/lemak	5	1 sat	5	1 sat

Standar Makanan Tambahan Lokal untuk Balita

Komposisi Makanan Tambahan Lokal bagi balita (6-59 bulan) dalam satu hari

Zat Gizi	Usia Balita			
	6 - 8 bln	9 -11 bln	12 - 23 bulan	24 - 59 bulan
Kalori (kkal)	175 – 200	175 – 200	225 – 275	300-450
Protein (gr)	3.5 – 8*	3.5 – 8*	4.5 – 11*	6 – 18*
Lemak (gr)	4.4 – 13	4.4 – 13	5.6 – 17.9	7.5 – 29.3

Protein Energy Ratio (PER) sebesar 10% - 16%



Makanan tambahan kaya protein hewani dengan prinsip gizi seimbang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk (diutamakan 2 jenis lauk hewani) serta sayur dan buah.



Contoh **Standar Bahan Makanan Tambahan Lokal** bagi balita (6 – 59 bulan) yang disiapkan untuk 1 kali makan (makanan lengkap/kudapan)

Bahan Makanan	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)
Makanan Pokok (beras)	50	½ gelas
Lauk hewani 1 (telur)	30	1 butir telur ayam ukuran kecil
Lauk hewani 2 (ayam/ikan/daging)	30	½ potong sedang ayam atau daging/ ½ ekor ikan ukuran sedang
Lauk nabati (kacang2an/tempe/tahu)	25	½ potong sedang
Sayur	30	1/3 gelas ukuran 250 ml
Buah	50	1 buah
Minyak/lemak	5	1 sdt

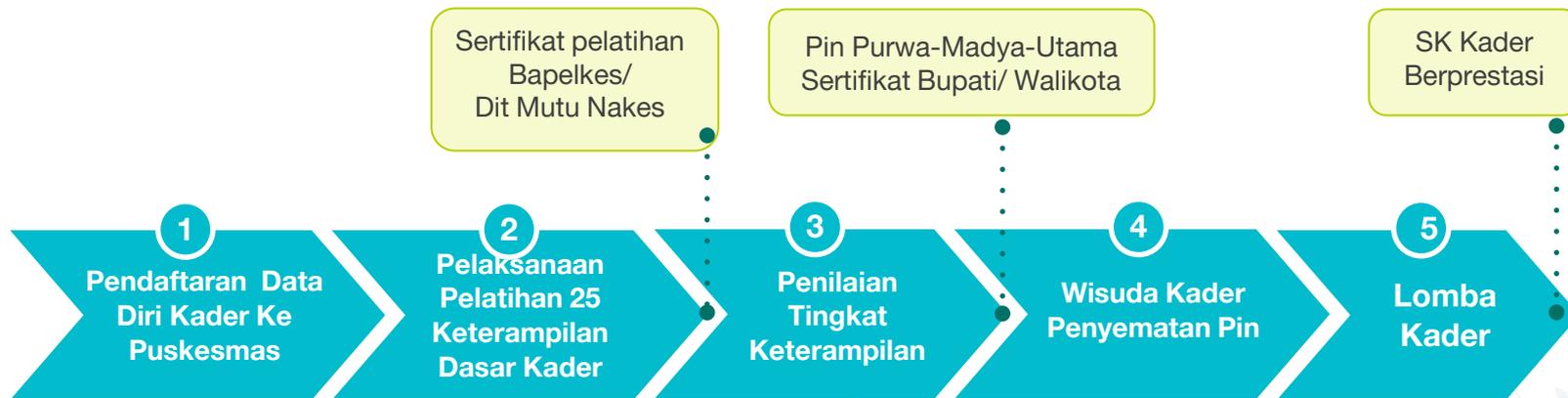
Berupa tambahan asupan (30-50% dari kebutuhan total kalori harian) dan **bukan sebagai pengganti makanan utama**

PENYIAPAN KADER POSYANDU



RANGKAIAN PENINGKATAN KAPASITAS KADER

Alur rangkaian pelatihan kader dilaksanakan mulai dari pendaftaran hingga pemberian apresiasi melalui Jambore Kader



Microsite 20 May 2024:

- Jumlah kader: 1,093,404
- Mengikuti pelatihan: 17,725
- Mengikuti penilaian: 15,087

Kurikulum pelatihan keterampilan dasar kader:

<https://s.id/KurikulumPelatihanKeterampilanKader>

Praktik Lapangan untuk dilaksanakan dalam Pelatihan Keterampilan Dasar Kader

Praktik lapangan dilakukan di Posyandu dan Rumah Warga, peserta mempraktekkan pelayanan hari buka terhadap siklus hidup dan kunjungan rumah.

Kesehatan Bayi, Balita	Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui	Pengelolaan posyandu
<p>Pelayanan Hari Buka kepada sasaran balita</p>	<p>Pelayanan Hari Buka kepada sasaran ibu hamil dan ibu menyusui</p>	<p>Kunjungan Rumah</p>
		
<p>Fasilitator memberikan pendampingan pelayanan sesuai standar</p>	<p>Fasilitator memberikan pendampingan pelayanan sesuai standar</p>	<p>Fasilitator memberikan pendampingan pelayanan sesuai standar</p>

PENILAIAN TINGKAT KETERAMPILAN KADER POSYANDU

Peserta terdiri dari kader yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan/workshop keterampilan dasar kesehatan

Penilai terdiri dari 2 orang nakes terlatih keterampilan dasar kader, nakes pustu/puskesmas/dinkes (1 orang nakes disarankan dari eksternal pembina posyandu, bisa dari nakes pustu/puskesmas wilayah lainnya atau dinkes)

Teknis pelaksanaan:

1. Dinkes memfasilitasi penjadwalan penilaian puskesmas.
2. Dinkes memfasilitasi skema penilaian bulanan: frekuensi, durasi dan jumlah daftar tilik
3. Pembiayaan APBD, DAK NF (biaya transport dan konsumsi, serta belanja bahan)

Jumlah Daftar Tilik	Penilaian TKK
	Penjelasan TKK
4	Penilaian kelompok keterampilan pengelolaan posyandu
7	Penilaian kelompok keterampilan layanan balita
6	Penilaian kelompok keterampilan layanan ibu
3	Penilaian kelompok keterampilan layanan remaja
5	Penilaian kelompok keterampilan layanan dewasa/ lansia
	Kesimpulan & Penutupan

Sertifikat Bupati/Walikota
*Peserta
*Penilai

PENCATATAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KETERAMPILAN KADER

Dinas Kesehatan, Puskesmas melatih dan menilai keterampilan dasar kader posyandu, data bulan Juni segera diinput dalam microsite.

INSTRUKSI PELATIHAN/WORKSHOP	STATE PLATIHAN/WORKSHOP	STATE PENULISAN PRICELATIHAN/WORKSHOP
1. Kemampuan Pengetahuan Populasi		
a. Menyajikan informasi mengenai populasi untuk seluruh siklus hidup	Sudah	Isi/isi
b. Melakukan presentasi dan pengajaran populasi	Sudah	Isi/isi
c. Melakukan komunikasi efektif	Sudah	Isi/isi
2. Kemampuan Misi dan Balita		
a. Menyajikan penggunaan buku KIA bagian Balita	Sudah	Isi/isi
b. Melakukan penyuluhan di Etalase, AP-10 atau Posyandu sesuai siklus umur	Sudah	Isi/isi
c. Melakukan pemantauan, pengajaran Posing/tinggi badan dan tegak badan, bergak dan	Sudah	Isi/isi
d. Menyajikan hasil pengamatan hasil tes tinggi badan-normal, kurang dan tidak terjalanya	Sudah	Isi/isi
e. Menyajikan informasi perkembangan, status dan cara saat sedang sedang umur	Sudah	Isi/isi
f. Menyajikan informasi mengenai fungsi lengkap dari PMS, Hepatitis, Sifilis, Chlamydia, Gonorea, Sifilis	Sudah	Isi/isi
g. Menyajikan presentasi dan data survey misi dan balita	Sudah	Isi/isi
3. Kemampuan Keterampilan dan Berwingspan		
a. Menyajikan penggunaan buku KIA bagian Ibu, Remaja, NKA	Sudah	Isi/isi
b. Melakukan penyuluhan ke keluarga dan rumah dan ibu terjalanya	Sudah	Isi/isi
c. Melakukan presentasi dan data survey misi dan NKA	Sudah	Isi/isi
d. Menyajikan data dan buku hasil pemantauan balita, bergak, tegak dan informasi status dengan buku KIA	Sudah	Isi/isi
e. Menyajikan informasi perkembangan, status dan cara saat sedang sedang umur	Sudah	Isi/isi
f. Menyajikan presentasi dan data survey misi dan NKA	Sudah	Isi/isi

INSTRUMEN

PENILAIAN TINGKAT KETERAMPILAN KADER

Puskesmas melakukan penilaian keterampilan kader pasca pelatihan, dan mencatatkannya pada Microsite.

Daftar tilik penilaian keterampilan kader dapat diakses pada link berikut ini :

Keterampilan Ibu Hamil & Menyusui

-  https://s.id/KD_I_PenyuluhanDenganBukuKIAIbu
-  https://s.id/KD_I_PenyuluhanPemeriksaanIbu
-  https://s.id/KD_I_MenjelaskanPemantauanBB
-  https://s.id/KD_I_MenjelaskanAnjuranTTD
-  https://s.id/KD_I_PenyuluhanIsiPiringkulbu
-  https://s.id/KD_I_PemantauanBahayalbu

Keterampilan Bayi & Balita

-  https://s.id/KD_II_PenyuluhanDenganBukuKIA
-  https://s.id/KD_II_PenimbanganPengukuran
-  https://s.id/KD_II_MenjelaskanHasilPengukuran
-  https://s.id/KD_II_PenyuluhanASIEksklusif
-  https://s.id/KD_I_PenyuluhanVitAObatCacing
-  https://s.id/KD_II_PenyuluhanImunisasi
-  https://s.id/KD_II_PenyuluhanPemantauanBahaya



Purwa

- 3 Kelompok keterampilan
- 11 pin (ungu dan biru), ditambah salah satu kelompok pin pink atau hijau atau kuning



Madya

- 4 Kelompok keterampilan
- Pin purwa ditambah 1 kelompok keterampilan



Utama

- 5 Kelompok keterampilan
- 25 pin

Keterampilan Pengelolaan Posyandu

-  https://s.id/KD_V_MenjelaskanLayanan
-  https://s.id/KD_V_KunjunganRumah
-  https://s.id/KD_V_KomunikasiEfektif
-  https://s.id/KD_V_PencatatanPelaporan

Keterampilan Usia Sekolah & Remaja

-  https://s.id/KD_III_IsiPiringku
-  https://s.id/KD_III_PencegahanAnemia
-  https://s.id/KD_III_PenyuluhanRokokNapza

Keterampilan Usia Produktif dan Lansia

-  https://s.id/KD_IV_PenyuluhanGernas
-  https://s.id/KD_IV_DeteksiDiniDewasaLansia
-  https://s.id/KD_IV_SkriningLansia
-  https://s.id/KD_IV_PenyuluhanPenyakitTerbanyak
-  https://s.id/KD_IV_PenyuluhanKB



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Manfaat Buku KIA bagi bayi dan balita					
2.	Menggunakan lembar Buku KIA bagi keluarga balita					
3.	Menggunakan lembar pemantauan layanan bayi dan balita					
4.	Menggunakan lembar pemantauan ASI					
5.	Menggunakan lembar pemantauan Makanan Pendamping ASI					
6.	Menggunakan lembar pemantauan berat badan					
7.	Menggunakan lembar pemantauan panjang/tinggi badan					
8.	Menggunakan lembar pemantauan lingkar kepala					
9.	Menggunakan lembar pemantauan perkembangan					
10.	Menggunakan lembar Kelas Ibu Balita					
11.	Pemantauan tanda bahaya bayi balita					
Total Skor						

Cara pemberian skor
 0 = keterampilan tidak diterapkan pada saat observasi
 1 = keterampilan diterapkan sesuai pedoman

DAFTAR TILIK KETERAMPILAN BAYI DAN BALITA: Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI dan pemberian makan kaya protein hewani sesuai umur balita



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kriteria ASI Eksklusif dan manfaat bagi bayi					
2.	MP ASI Kaya Protein Hewani Bayi Usia 6 - 8 bulan					
3.	MP ASI Kaya Protein Hewani Bayi Usia 8 - 11 bulan					
4.	MP ASI Kaya Protein Hewani Balita Usia 12 - 23 bulan					
5.	MP ASI Kaya Protein Hewani Balita Usia 2 - 5 tahun					
	Total Skor					

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Kepatuhan penimbangan berat badan bayi					
2.	Kepatuhan penimbangan berat badan balita					
3.	Kepatuhan pengukuran panjang badan bayi					
4.	Kepatuhan pengukuran tinggi badan balita					
5.	Kepatuhan pengukuran lingkar kepala					
6.	Kepatuhan pengukuran lingkar lengan atas					
	Total Skor					

Total 69 Pertanyaan dalam daftar tilik penimbangan dan pengukuran, Link instrumen
<https://link.kemkes.go.id/MonevPOSYANDU>,

Kategori penilaian kepatuhan kader	
a. Kurang	<41
b. Cukup	41 - 54
c. Baik	55 - 61
d. Sangat Baik	62 - 69



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menjelaskan cara menggunakan buku KIA untuk melakukan stimulasi perkembangan					
2.	Menjelaskan cara pemberian Vitamin A (kapsul Biru dan merah) dan manfaatnya					
3.	Menjelaskan cara pemberian obat cacing dan manfaatnya					
	Total Skor					

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman

Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan tindaklanjutnya



Keterampilan		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menjelaskan hasil penimbangan anak berdasarkan grafik KMS (normal)					
2.	Menjelaskan hasil pengukuran panjang/ tinggi anak berdasarkan grafik Panjang/ tinggi badan (normal)					
3.	Menjelaskan kesimpulan hasil penimbangan dibandingkan bulan sebelumnya (berat badan tidak naik, tetap, naik tidak cukup)					
4.	Menjelaskan kesimpulan hasil pengukuran berat badan menurut usia					
5.	Menjelaskan kesimpulan hasil pengukuran panjang/tinggi tidak baik (stunting)					
6.	Menjelaskan hasil pengukuran lingkaran kepala pada grafik					
7.	Menjelaskan hasil pengukuran lingkaran lengan atas (LILA)					
8.	Menjelaskan hasil penimbangan, pengukuran perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tenaga kesehatan					
9.	Menjelaskan cara pengisian ceklis perkembangan sesuai usia					
10.	Menjelaskan tindak lanjut atas hasil pengisian ceklis perkembangan					
	Total Skor					

Cara pemberian skor
 0 = keterampilan tidak sesuai pedoman
 1 = keterampilan sesuai pedoman

Melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap dan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menjelaskan pengertian imunisasi rutin lengkap					
2.	Menjelaskan jadwal imunisasi Bayi, Baduta					
3.	Menjelaskan risiko jika tidak imunisasi					
4.	Menjelaskan tentang Penyakit-Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menjelaskan tanda bahaya bayi dan balita, risiko jika tidak melaksanakan rujukan ke fasilitas kesehatan					
2.	Menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi 0-2 bulan oleh keluarga menggunakan buku KIA					
3.	Menjelaskan pemantauan tanda bahaya balita > 2 bulan oleh keluarga menggunakan buku KIA					
4.	Menjelaskan rujukan segera ke fasilitas kesehatan jika menemukan salah satu tanda bahaya					
5.	Lembar pemantauan harian bayi 0-2 bulan					
	Total Skor					

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menyampaikan informasi manfaat Buku KIA bagi ibu hamil dan ibu nifas					
2.	Menyampaikan informasi menggunakan lembar Buku KIA yang digunakan ibu hamil dan ibu nifas untuk mendapat informasi kesehatan					
3.	Menyampaikan informasi menggunakan lembar pemantauan kelengkapan layanan ibu hamil dan ibu nifas					
4.	Menyampaikan informasi menggunakan lembar porsi makan ibu hamil dan ibu menyusui					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Melakukan edukasi pada ibu hamil porsi makan dalam satu hari					
2.	Melakukan edukasi pada ibu hamil jenis makanan dalam piring setiap kali makan					
3.	Melakukan edukasi pada ibu menyusui porsi makan dalam satu hari					
4.	Melakukan edukasi pada ibu menyusui jenis makanan dalam piring setiap kali makan					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menganjurkan ibu hamil periksa sedikitnya 6X, pemeriksaan dengan dokter pada kunjungan 1 dan 5					
2.	Menganjurkan menyiapkan keluarga untuk mendampingi ibu jika perlu rujukan ke rumah sakit					
3.	Menganjurkan ibu nifas untuk melakukan perawatan 4 kali oleh tenaga kesehatan					
4.	Menggunakan alat kontrasepsi langsung setelah melahirkan sampai 42 hari setelah melahirkan					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman

Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan dan tekanan darah dengan kurva Buku KIA



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menyampaikan informasi pemantauan berat badan dengan menggunakan lembar kurva berat badan					
2.	Menyampaikan informasi pemantauan tekanan darah dengan menggunakan lembar kurva tekanan darah					
3.	Menyampaikan informasi pemantauan kondisi kehamilan menggunakan lembar pemeriksaan ibu hamil catatan tenaga kesehatan					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Kader A	Kader B	Kader C	Kader D	Kader E
1.	Menganjurkan ibu hamil untuk memeriksa kandungan TTD (dari kemasan) sedikitnya mengandung 60 mg zat besi dan 400 mcg asam folat					
2.	Menganjurkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah (TTD) setiap hari selama kehamilan					
3.	Menganjurkan mencatat pada kartu kontrol minum TTD setiap hari					
4.	Menganjurkan cara minum tablet tambah darah (setelah makan, pada malam hari, minum dengan air putih)					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman



Keterampilan:		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1.	Menjelaskan tentang tanda bahaya pada ibu hamil dan ibu nifas					
2.	Menjelaskan pemantauan tanda bahaya pada ibu hamil dan ibu nifas menggunakan lembar pemantauan harian					
3.	Menjelaskan rujukan yang harus dilakukan jika terdapat salah satu tanda bahaya ibu hamil ibu nifas					
4.	Menjelaskan hal-hal penting yang harus disiapkan ibu untuk keperluan rujukan (KTP, Kartu Jaminan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Terdekat)					
Total Skor						

Cara pemberian skor

0 = keterampilan tidak sesuai pedoman

1 = keterampilan sesuai pedoman

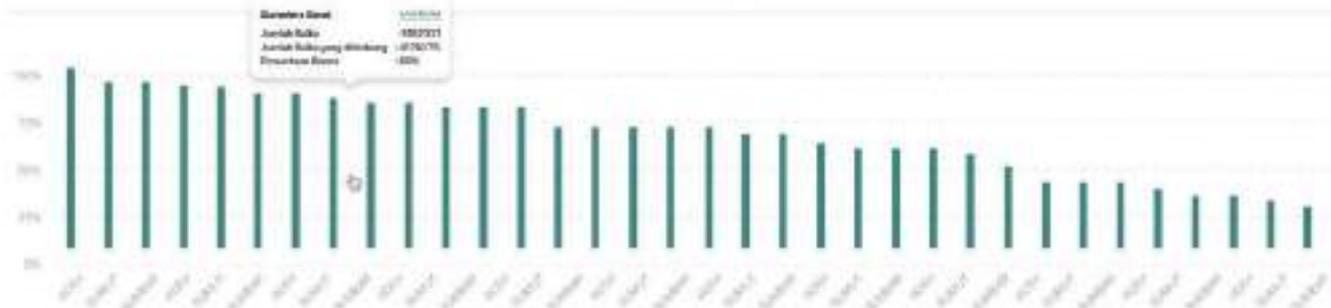
Dashboard Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024



Sasaran Semua Provinsi yang Diukur

1 Juni 2024

Sasaran yang Diintervensi



Dashboard Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024

	Ketersediaan Alat Antropometri	Kalibrasi Alat Antropometri	Kesiapan Kader ⓘ
Posyandu Mawar	✓ Tersedia	✓ Terkalibrasi	✓ Siap
Posyandu Anggrek	✓ Tersedia	✗ Belum kalibrasi	✓ Siap
Posyandu Bugentili	✗ Belum tersedia	✗ Belum kalibrasi	✓ Siap
Posyandu Kamboja	✗ Belum Tersedia	✗ Belum kalibrasi	✓ Siap
Posyandu Melati	✓ Tersedia	✗ Belum kalibrasi	✓ Siap
Posyandu Tulip	✓ Tersedia	✗ Belum kalibrasi	✗ Belum Siap
Posyandu Matahari	✗ Belum Tersedia	✗ Belum kalibrasi	✓ Siap

<https://link.kemkes.go.id/IntervensiSerentakPencegahanStunting>

Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar mengisi data kontak Kepala Dinas dan Ketua TPPS.

Setiap dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas melakukan kompilasi jadwal hari buka posyandu dan mengisinya melalui tautan :

<https://link.kemkes.go.id/IntervensiSerentakPencegahanStunting>

paling lambat tanggal **31 Mei 2024**.

Kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting diselenggarakan menggunakan penganggaran baik pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku